

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2008)
- Agus Pandoman, *Teori & Praktek Akta Perikatan Publisitas & Non Publisitas*, (Jakarta: PT. Raja Utama Kreasi, 2017)
- Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP Korupsi, Money Laundering dan Trafficking*, (Jakarta: PT. Raja Utama Kreasi, 2017)
- Budi Agus Riswandi dan Sabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Kreatif*, (Yogyakarta: Total Media, 2009)
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Ellise T. Sulastini dan Aditya Wahyu, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Habib Ajie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2015)
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013)
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015)
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)
- Komar Sugondo, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Cetakan Kedua Alumni, 2000)
- Lumbang Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advocaat, Dokter dan Notaris*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985)
- M. Isa Arief, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: PT Intermedia, 1986)
- M. Luthfan Hadi Daurus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017)
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Nawawi Arman, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Sempurna*, (Jakarta: Media Ilmu, 2011)
- N.H.T Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala Permata, 2008)

- Pieter E Latumenten, *Prosedur Hukum Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN Nomor 30 Tahun 2004*, (Bandung: Eressco, 2010)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011)
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Ridwan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Umum*, (Jakarta: PT Garuda Metropolitan Press, 2000)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sjahputra Iman, *Money Laundering Suatu Pengantar*, (Jakarta: Harvindo, 2006)
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Laundering di Indonesia*, Notaris dalam Pembuatan Akta, (Bandung: Mandar Madju, 2017)
- Syamsul Sidharta, *Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik*, (Jakarta: Prenada Media, 2010)
- Tubagus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)

JURNAL/ARTIKEL

- Arisaputra, “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Hak Ingkar Notaris”, *Jurnal Perspektif XVII*, Vol. 17 No. 3, 2012. DOI: <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/106>
- Sari Indah, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020. DOI: <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>
- Mia Elvina, “Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-sama”, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 2, 2020. DOI: <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/17203>
- George Whitecross Patton, “A Text-Book of Jurisprudence”, Oxford at the Claredo Press, Vol. 6, 1955. DOI: <https://lib.ui.ac.id/m/detail.jsp?id=20108834&lokasi=lokal>
- Raisa Maria Sapulete, “Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anti Pencucian Uang”, *Lex Et Societatis*, Vol. 1, No. 2, 2013. DOI: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1758>

Dyani Vina Akfa, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, 2017. DOI: <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/8000>

Hariyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik”, Yustisia Vol. 5, No. 2, 2016. DOI: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/8748/7832>

INTERNET

FATF, “The FATF Recommendations, International Standards On Combating Money Laundering and The Financing of Terrorism & Proliferation 2023”, https://www.fatf-gafi.org/en/topics/fatf-recommendations.html?hf=10&b=0&s=desc%28fatf_releasedate%29

FATF, “FATF Guidance, AMLCFT Measures and Financial Inclusion with Supplement on Customer Due Diligence CDD 2017”, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/Financial-inclusion-cdd-2017.html>

FATF, “FATF Guidance for a Risk-Based Approach Guidance for Legal Professionals 2019”, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Rba-legal-professionals.html>

FATF, “FATF Risk-Based Approach Guidance for the Real Estate Sector 2022”, <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-rba-real-estate-sector.html>

Norman Edwin Elnizar, PPATK Yakinkan Notaris Wajib Laporkan Tak Langgar Rahasia Jabatan, (Indonesia: Hukum Online, 2023). <https://hukumonline.com>

Kementerian Hukum dan HAM, Tata Cara Pengisian Form Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), (Indonesia: banten.kumham, 2022). <https://banten.kemerkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/8347-tata-cara-pengisian-form-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa-pmpj>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 148)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 126)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksana Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1087)

PUTUSAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor Putusan Nomor: 248/PID.B/2022/PN.Jkt.Brt

LAIN-LAIN

SOP Penulisan Tugas Akhir Tesis Program Studi Magister Hukum, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2022)

